DAFTAR PUSTAKA

- Akta Pendirian Perseroan. (2018). Akta Perseroan Firma “Mukh Nurkholis & Rekan” No.117.
- Akta Perseroan Terbatas. (2013). Akta Perseroan Terbatas No.07.
- Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., Nugraha, S. R., & Purwanti, T. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 2(2).
- APRILIDYA, L. M. (2020). *Pengaruh Keadilan Pajak, Norma Subjektif, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Daniswara, D., & Nuswantara, E. (2025). *Faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak: Pendekatan teori perilaku terencana*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 10(2), 78-92.
- Difinubun, Y., & Isnaini, P. N. (2022). Determinasi Sanksi Dan Kualitas Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Di Kpp Pratama Kota Sorong. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 58-70.
- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. (2014). Izin usaha sebagai perusahaan jasa pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja. Nomor 503/02313/PK/II/2014.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Panduan penggunaan e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Faisol, M., & Norsain, A. (2023). *Dampak beban psikologis dan ekonomi terhadap motivasi pelaporan pajak*. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 14(3), 120-134.
- Fikriyah, H. (2022). Dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 17(3), 112–120.
- Fikriyah, H. (2022). Pengaruh perubahan tarif PPh dan PPN terhadap ketentuan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal UIA*, 2024.
- FIKRIYAH, H. *PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPh DAN PPN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU E-COMMERCE DI KOTA TANGERANG SELATAN* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- Habibi, R., & Hasanah, N. (2023). *Pengaruh perubahan tarif PPN terhadap administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 11(1), 55-68.

- Handayani, R., & Putra, A. (2022). *Pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat dan perilaku wajib pajak*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 120-134.
- Hartono, B., & Wijaya, S. (2023). Perubahan tarif pajak konsumsi dan pengaruhnya terhadap perilaku belanja masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 12(1), 45-58.
- Hidayati, N., & Ramadhan, A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(2), 77-85.
- House, J., Robitaille, N., & Mazar, N. (2017). Kemungkinan Organisasi untuk Melaporkan Pajak yang Terlambat.
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 3(1), 45-60.
- Jurnal PNJ. (2019). Kepatuhan pajak dalam konteks PPN. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 15 (2), 89-95.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan 2020: Digitalisasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025. (2025). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Khan, AGZ (2020). *Faktor Penentu Ketidakpatuhan Pajak: Bukti dari Malaysia* (Tesis Magister, Universitas Malaya (Malaysia)).
- Khan, M. (2020). Tax compliance and policy changes: Evidence from developing countries. *Journal of Public Economics*, 45(2), 123-139.
- Lesi, A. (2021). *Pemahaman dasar perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 11(1), 45-58.
- Maretaniandini, R., Putri, A., & Widodo, S. (2023). Kenaikan PPN dan kepatuhan UMKM dalam pelaporan SPT. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(4), 200-210.
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42-55.
- Mukh Nurkholis & Rekan. (2018). *Profil Kantor Konsultan Pajak MNC0*. Yogyakarta: Mukh Nurkholis & Rekan.
- Muliari, M. (2020). Dampak kurangnya pengetahuan perpajakan terhadap pelaporan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12 (1), 67-75.
- Naibaho, L. (2020). Kepastian hukum dan kepatuhan pajak. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 11 (1), 23-30.

- Nurjanah, S. (2024). Analisis pengaruh perubahan PPN 12% terhadap kepatuhan wajib pajak Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 2024.
- OECD. (2013). *Kepatuhan pajak dan administrasi pajak*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2019). *Administrasi pajak 2019: Informasi komparatif tentang OECD dan negara-negara maju dan berkembang lainnya*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai. (2025). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai. (2024). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pratiwi, S. (2022). *Peran sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak setelah kenaikan tarif PPN*. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 9(2), 77-89.
- Putri, D. A. (2024). Kebijakan PPN yang adil dan dampaknya terhadap kepercayaan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(1), 78-90.
- Putri, D. A., & Setiawan, R. (2025). *Peningkatan pengetahuan pajak melalui sosialisasi dan pendidikan perpajakan*. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 14(2), 102-115.
- Repli, R., dkk. (2021). Dampak kenaikan tarif PPN terhadap administrasi perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14 (1), 45-60.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rizal, D. (2024). *Analisis penurunan nilai transaksi dan dampak kenaikan tarif PPN terhadap aktivitas usaha*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 40-53.
- Sairi, M. (2014). Teori atribusi dan esensinya dalam pemenuhan pajak. *Jurnal Ilmu sosial dan Humaniora*, 5(2), 123-130.
- Santoso, A., & Prasetyo, B. (2022). *Implementasi skema kredit pajak masukan-keeluaran dalam digitalisasi administrasi perpajakan*. Penerbit Akademika.
- Santoso, B. (2021). *Kesadaran wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 12(1), 45-59.
- Santoso, R., & Prasetyo, H. (2021). Stabilitas pendapatan negara melalui pajak konsumsi: Studi kasus PPN di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 110-123.
- Sari, D., & Santoso, B. (2021). Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 10(1), 45-58.
- Sari, L. P. (2022). Efektivitas kebijakan tarif PPN dalam pengendalian konsumsi barang mewah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 34-47.

- Sari, R. (2021). Tantangan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 13 (2), 101-115.
- Seftiyanti, L., & Benarda, M. (2025). Hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 9(1), 33-47.
- Setiawan, D. (2023). Analisis hubungan pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 22(1), 101–110.
- Sudirman, D., Hamid, E. A., Subagdja, A., & Setiawan, I. (2021). PENGARUH EDUKASI, SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 DAN NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 1298-1311.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Supriadi, A., Rahman, B., & Lestari, C. (2024). Pengaruh keyakinan kontrol perilaku terhadap niat dan perilaku wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 13(1), 45-60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (1983). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wulandari, M., & Nugroho, A. (2020). Sistem perpajakan yang efisien dan transparan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 8(4), 99-112.
- Wulandari, M., & Nugroho, A. (2020). Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak: Kajian teori dan praktik. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 8(4), 99-112.